

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK DINAS TENAGA KERJA TAHUN 2024

Jl. Dr. Wahidin Sudirihusodo No. 233
Telp/Faks. 031-3954041
Surel: disnaker@gresikkab.go.id
Gresik



**PERATURAN
KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN GRESIK
NOMOR 1 TAHUN 2024**

TENTANG

**RENCANA KERJA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN GRESIK
TAHUN 2025**



**DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN GRESIK
2024**



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

DINAS TENAGA KERJA

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 233 Gresik Jawa Timur 61124

Telp. & Faks. (031) 3951259, 3950251, 3954041,

Situs: disnaker.gresikkab.go.id, Surel: disnaker@gresikkab.go.id

PERATURAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN GRESIK

NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA DINAS TENGA KERJA

KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN GRESIK,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah perlu menetapkan Peraturan Kepala Dinas tentang Rencana Kerja Dinas Tenga Kerja Kabupaten Gresik Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6841);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2008 Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 24);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2009 Nomor 11);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 2);
21. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 35 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 Nomor Seri E);

22. Peraturan Bupati Gresik Nomor 72 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 72);
23. Peraturan Bupati Gresik Nomor 40 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2023 Nomor 34);
24. Peraturan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik Nomor 01 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik tahun 2021-2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DINAS TENTANG RENCANA KERJA DINAS TENGA KERJA KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Dinas ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Dinas Tenaga Kerja adalah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik.
4. Kepala Dinas Tenaga Kerja yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik.
5. Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja yang selanjutnya disebut Renja adalah Dokumen Perencanaan Dinas Tenaga Kerja untuk periode tahun 2025.
6. Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja yang selanjutnya disingkat dengan Renstra adalah dokumen perencanaan Dinas Tenaga Kerja untuk periode 5 (lima) tahun.

7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat dengan APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik.
9. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
10. Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah.
11. Forum Perangkat Daerah merupakan forum sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah untuk merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah provinsi dan kabupaten/ kota. Forum Perangkat Daerah merupakan forum sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah untuk merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Pasal 2

- (1) Renja Tahun 2025 merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Tahunan Dinas Tenaga Kerja untuk Periode Tahun 2025 dan merupakan penjabaran dari Renstra Tahun 2021 – 2026.
- (2) Renja Tahun 2025 disusun berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025 dan Renstra Tahun 2021 – 2026.
- (3) Penyusunan Renja Tahun 2025, didahului dengan penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah.

- (4) Renja Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Dinas Tenaga Kerja untuk menyusun RKA dan DPA Tahun 2025

Pasal 3

Renja Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I : PENDAHULUAN
- b. BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU
- c. BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
- d. BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
- e. BAB V : PENUTUP

Pasal 4

Uraian Renja Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala dinas ini.

Pasal 5

Peraturan Kepala dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gresik

Pada tanggal 25 Oktober 2024



LAMPIRAN

**PERATURAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN GRESIK
NOMOR 01 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KERJA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2021–2025, serta Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik Tahun 2021–2026 sesuai dengan tugas dan fungsi yang menjadi tanggung jawab Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik.

Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik Tahun 2025 tersebut merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik Tahun 2021–2026, menjadi bahan materi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Gresik guna menyusun dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025, serta menjadi acuan dan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik Tahun 2025.

Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik Tahun 2025 memuat Kebijakan, Program, dan Kegiatan Pembangunan yang direncanakan pada Tahun 2025 berdasarkan hasil Forum Perangkat Daerah (Forum PD) Kabupaten Gresik.

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik Tahun 2025 ini mengakomodasi amanat, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dengan disusunnya Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik Tahun 2025 semoga dapat diimplementasikan sebaik-baiknya dalam menyusun perencanaan pembangunan tahunan daerah.

Kepada semua pihak yang telah berperan dalam penyusunan dokumen rencana kerja ini disampaikan terimakasih. Namun demikian berbagai upaya korektif bagi penyempurnaan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik pada masa mendatang senantiasa diharapkan dari semua pihak.

Gresik, 25 Oktober 2025



DAFTAR ISI

	Hal
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika penulisan	5
 BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik	7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik	19
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik	21
2.4. Reviu terhadap Rancangan awal RKPD	25
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	33
 BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	36
3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik	38
3.3. Program dan Kegiatan	41
 BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	57
 BAB V : PENUTUP	58

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 dan disusun dengan mengacu pada Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2025.

Sebagai dokumen perencanaan tahunan, Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik memuat kebijakan pembangunan, sasaran, uraian program dan kegiatan serta prioritas pembangunan. Spektrum pembiayaan sebagai alat untuk mengimplementasikan pelaksanaan program meliputi pendanaannya yang terkait dengan APBD Kabupaten Gresik, APBD Provinsi dan APBN maupun dari investasi masyarakat serta swasta.

Proses penyusunan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik Tahun 2025 didasarkan pada penjaringan aspirasi yang secara formal diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD sebagaimana diamanatkan pada Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu secara kontekstual dalam mekanisme perencanaan, secara substantif Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik Tahun 2025 mengintegrasikan program-program pemerintah pusat sebagaimana amanat Peraturan Presiden tentang RKP, program Kabupaten Gresik maupun program-program hasil penjaringan aspirasi yang telah diformulasikan melalui Forum OPD Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik maupun Musrenbang RKPD.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik tahun 2025 yang memuat prioritas pembangunan, kerangka ekonomi dan secara rinci dijabarkan dalam agenda dan sub agenda pembangunan disusun dengan maksud untuk memberikan landasan dan pedoman bagi semua pelaku pembangunan dalam memanifestasikan kegiatan pembangunan di Gresik.

Bagi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik berkewajiban menyusun rencana program dan kegiatan APBD. Dengan demikian

dokumen ini akan bermanfaat dalam rangka mewujudkan keterpaduan dan mensinergikan pembiayaan pembangunan dari berbagai sumber misalnya APBD, swasta, donatur masyarakat, dan sebagainya. Oleh karena itu, program-program pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik tahun 2025, menjadi acuan dalam penyusunan Arah dan Kebijakan Umum serta Strategi dan Prioritas (AKU-SP) APBD Kabupaten Gresik tahun 2025 .

1.2. LANDASAN HUKUM

Adapun ketentuan peraturan perundangan sebagai landasan penyusunan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik Tahun 2025, antara lain meliputi :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik

sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
21. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 35 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023;
22. Peraturan Bupati Gresik Nomor 72 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik;
23. Peraturan Bupati Gresik Nomor 40 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025;
24. Peraturan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik tahun 2021-2026;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

A. Maksud

Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik 2025 disusun dengan maksud sebagai acuan dalam penyusunan Arah dan Kebijakan Umum serta Strategi dan Prioritas APBD 2025. Hal ini sebagaimana secara yuridis diamanatkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

B. Tujuan

Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik Tahun 2025 ini nantinya menjadi pedoman penyusunan Kebijakan Umum APBD dan penyusunan RAPBD, sehingga

terjadi konsistensi antara perencanaan dan penganggaran daerah.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Dokumen-Dokumen Perencanaan Pembangunan yang harus dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten adalah :

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
3. Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra-OPD)
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
5. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
6. Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD)
7. Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA-OPD)
8. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

1.3. Sistematika Penulisan

Dalam menyusun Perencanaan ini menggunakan pendekatan normatif dan deskriptif serta forum OPD dengan sistematika sebagai berikut:

BAB. I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar belakang
- 1.2. Maksud dan Tujuan
- 1.3. Landasan Hukum
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB. II : EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik
- 2.4. Reviu terhadap Rancangan akhir RKPD

- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB. III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB. IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB. V : PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN GRESIK TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja Tahun 2023 dan Capaian Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja Tahun 2023 dan Capaian Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target Kinerja Program dan Kegiatan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik, serta mengidentifikasi hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Evaluasi didasarkan atas laporan hasil pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik tahun-tahun sebelumnya, laporan pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik dan perkiraan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) tahun berjalan yang disahkan.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja dan pencapaian kinerja Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik tahun-tahun sebelumnya, maka dapat diuraikan sebagai berikut.

a. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

- 1) Realisasi program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota indikator kinerja kegiatan adalah:
 - a) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan output tersedianya kertas kop, amplop surat, lembar disposisi, stopmap PM dan arsip surat.

Target tercapai 100% karena tersedianya anggaran untuk penyediaan barang cetakan dan lain-lain

- b) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan *output* tersedianya bahan bacaan, target tercapai 100 % karena tersedianya anggaran untuk penyediaan bahan bacaan (3 jenis koran)
 - c) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor *output* tersedianya makanan dan minuman, target tercapai 100 % karena tersedianya anggaran untuk penyediaan Makanan dan minuman baik untuk harian, tamu dan makanan dan minuman rapat kegiatan
- 2) Realisasi Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah indikator kinerja kegiatan adalah:
- a) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya *output* Terpeliharanya kantor dinas
 - b) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan *output* terpeliharanya kendaraan dinas
- 3) Realisasi Program / Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah indikator kinerja kegiatan adalah:
- a) Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD *output* buku Lakip
 - b) Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja OPD *output* jumlah buku Renja

b. Realisasi Program/Kegiatan tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja outputnya jumlah peserta pelatihan dengan capaian target Renja

sebesar 100% sedang target Renstra 20 % Faktor tidak tercapainya target Renstra karena di tahun 2023 rencana pelatihan bagi pencari kerja sebanyak 100 orang dan realisasi hanya 20 orang.

c. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Program program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dengan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat adalah Jumlah surat terkirim selama 1 tahun mencapai target Renja pada tahun lalu. Faktor penyebab tercapainya target karena semakin banyak surat yang terkirim dari target yang direncanakan 3000 surat tercapai 3700 surat (123%) sehingga berimplikasi pada kelancaran dinas, untuk capaian target Renstra terealisasi 123%. kebijakan yang dilaksanakan untuk mencukupi kebutuhan surat menyurat perencanaan dan penganggaran tetap dilaksanakan.

Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik Tahun 2023 dapat dikatakan berhasil. Ini dapat dilihat dari realisasi Belanja Langsung pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik Tahun 2023 yang mencapai 93,67 % dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Sisa	Realisasi (%)
	Belanja Langsung	10.191.373.127	9.535.574.555,93	655.798.571,07	93,67

**Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD dan
Pencapaian Renstra PD s.d. Tahun 2023
Kabupaten Gresik**

Dinas Tenaga Kerja Kab. Gresik

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun berjalan		Catatan
					Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja PD tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023 (%)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Rutin dan non kumulatif
2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah jenis Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	3 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	100%	3 jenis	100 %	100 %	Rutin dan non kumulatif
2.07.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100%	4 dokumen	100%	100%	Rutin dan non kumulatif
2.07.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Buku	12 Buku	12 Buku	12 Buku	100%	12 Buku	100%	100%	Rutin dan non kumulatif
2.07.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	12 Buku	12 Buku	12 Buku	12 Buku	100%	12 Buku	100%	100%	Rutin dan non kumulatif
2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pembayaran Gaji, TTP dan Laporan Keuangan	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	100%	100%	Rutin dan non kumulatif
2.07.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai ASN yang	32 Orang	32 Orang	32 Orang	32 Orang	100%	32 Orang	100%	100%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun berjalan		Catatan
					Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja PD tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023 (%)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
		mendapat gaji dan tunjangan									
2.07.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	30 buku	30 buku	30 buku	30 buku		30 buku	100%	100%	Rutin dan non kumulatif
2.07.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan	60 Buku	60 Buku	60 Buku	60 Buku	100%	60 Buku	100%	100%	Rutin dan non kumulatif
2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis penyediaan administrasi umum perangkat daerah	6 jenis sub kegiatan	6 jenis sub kegiatan	6 jenis sub kegiatan	6 jenis sub kegiatan	100%	6 jenis sub kegiatan	100%	100%	Rutin dan non kumulatif
2.07.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik yang disediakan	9 Jenis	9 Jenis	9 Jenis	9 Jenis	100%	9 Jenis	100%	100%	Rutin dan non kumulatif
2.07.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	100%	4 Paket	100%	100%	Rutin dan non kumulatif
2.07.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah penyediaan makan dan minum	4030 porsi	4030 porsi	4030 porsi	4030 porsi	100%	4030 porsi	100%	100%	Rutin dan non kumulatif
2.07.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bahan cetak; Jumlah pengadaan	7 Jenis; 917 lembar	7 Jenis; 917 lembar	7 Jenis; 917 lembar	7 Jenis; 917 lembar	100%	7 Jenis; 917 lembar	100%	100%	Rutin dan non kumulatif
2.07.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan	8 Jenis	8 Jenis	8 Jenis	8 Jenis	100%	8 Jenis	100%	100%	Rutin dan non kumulatif

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun berjalan		Catatan
					Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja PD tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023 (%)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
2.07.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	55 kali	55 kali	55 kali	55 kali	100%	55 kali	100%	100%	Rutin dan non kumulatif
2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Sarana dan Prasarana	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun		1 Tahun	100%	100%	Rutin dan non kumulatif
2.07.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana yang disediakan	11 Unit	11 Unit	11 Unit	11 Unit	100%	11 Unit	100%	100%	Rutin dan non kumulatif
2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	100%	66%	Rutin dan non kumulatif
2.07.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah waktu penyediaan jasa surat menyurat	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	100%	100%	Rutin dan non kumulatif
2.07.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan internet	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	100%	100%	Rutin dan non kumulatif
2.07.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Administrasi Kantor Non ASN	22 Orang	22 Orang	22 Orang	22 Orang	100%	22 Orang	100%	100%	Rutin dan non kumulatif
2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Gedung, Peralatan kantor dan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	100%	100%	Rutin dan non kumulatif

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun berjalan		Catatan
					Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja PD tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023 (%)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
		Kendaraan Dinas									
2.07.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Mobil; Jumlah Kendaraan Sepeda Motor	7 Unit; 10 Unit	7 Unit; 10 Unit	7 Unit; 10 Unit	7 Unit; 10 Unit	100%	7 Unit; 10 Unit	100%	100%	Rutin dan non kumulatif
2.07.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan kantor	6 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	70%	6 Jenis	100%	100%	Rutin dan non kumulatif
2.07.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan gedung kantor; Jumlah pemeliharaan taman	1 paket; 1 paket	1 paket; 1 paket	1 paket; 1 paket	1 paket; 1 paket	100%	1 paket; 1 paket	100%	100%	Rutin dan non kumulatif
2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Data Sektoral Dinas Tenaga Kerja yang diakses secara elektronik; Tingkat Kematangan Layanan Ketenagakerjaan	40%;1	40%;1	40%;1	40%;1	100%	40%;1	100%	100%	
2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah data dan informasi profil ketenagakerjaan	15 Buku	15 Buku	15 Buku	15 Buku	100 %	15 Buku	100%	100%	
2.07.02.2.01.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Aplikasi (SIM); pemeliharaan website; Profil Ketenagakerjaan	1 Aplikasi; 15 Buku	1 Aplikasi; 15 Buku	1 Aplikasi; 15 Buku	1 Aplikasi; 15 Buku	100 %	1 Aplikasi; 15 Buku	100%	100%	
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN	Persentase	37,28%	37,28%	37,28%	37,28%	100 %	37,28%	100%	100%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun berjalan		Catatan
					Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja PD tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023 (%)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
	KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Pencari Kerja yang diberi pelatihan									
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Terlaksananya pembinaan LPKS dan pelatihan bagi masyarakat pencari kerja	228 orang	228 orang	228 orang	228 orang	100%	228 orang	100%	100%	
2.07.03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Lembaga Pelatihan Kerja Swasta, Masyarakat pencari kerja	30 LPKS; 168 orang; 8 BLK Komunitas	30 LPKS; 168 orang; 8 BLK Komunitas	30 LPKS; 168 orang; 8 BLK Komunitas	30 LPKS; 168 orang; 8 BLK Komunitas	100 %	30 LPKS; 168 orang; 8 BLK Komunitas	100%	100%	
2.07.03.2.04	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Terlaksananya konsultasi produktivitas pada perusahaan kecil	105 Perusahaan	105 Perusahaan	105 Perusahaan	105 Perusahaan	100 %	105 Perusahaan	100%	100%	
2.07.03.2.04.01	Pelatihan & konsultasi Produktifitas	Jumlah peserta pelatihan	105 Perusahaan	105 Perusahaan	105 Perusahaan	105 Perusahaan	100 %	105 Perusahaan	100%	100%	
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan	48,94%	48,94%	48,94%	48,94%	100 %	48,94%	100%	100%	
2.07.04.2.01	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi pelayanan antarkerja bagi masyarakat pencari kerja	305 Orang	305 Orang	305 Orang	305 Orang	100%	305 Orang	100%	100%	
2.07.04.2.01.02	Pelayanan antar Kerja	Penempatan pencari kerja di perusahaan	263 Orang, 10 Orang	263 Orang, 10 Orang	263 Orang, 10 Orang	263 Orang, 10 Orang	100%	263 Orang, 10 Orang	100%	100%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun berjalan		Catatan
					Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja PD tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023 (%)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
		wilayah Kabupaten Gresik, Penempatan pencari kerja penyandang disabilitas									
2.07.04.2.01.05	Perluasan Kesempatan Kerja	Pembinaan tenaga kerja mandiri	32 Orang	32 Orang	32 Orang	32 Orang	100%	32 Orang	100%	100%	
2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Tersedianya Informasi Pasar Kerja bulanan dan tahunan	65 Buku	65 Buku	65 Buku	65 Buku	100%	65 Buku	100%	100%	
2.07.04.2.03.02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Buku laporan IPK bulanan dan tahunan, Job Interview	65 Buku, 1 paket	65 Buku, 1 paket	65 Buku, 1 paket	65 Buku, 1 paket	100%	65 Buku, 1 paket	100%	100%	
2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan perlindungan bagi PMI (Pra dan Purna Penempatan)	105 Orang	105 Orang	105 Orang	105 Orang	100%	105 Orang	100%	100%	
2.07.04.2.04.01	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Pembinaan Penempatan dan perlindungan PMI	20 Orang, 85 Orang	20 Orang, 85 Orang	20 Orang, 85 Orang	20 Orang, 85 Orang	100%	20 Orang, 85 Orang	100%	100%	
									100%		
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja	23,36%	23,36%	23,36%	23,36%	100%	23,36%	100%	100%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun berjalan		Catatan
					Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja PD tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023 (%)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
		Bersama									
2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta pembinaan Persyaratan Kerja; Jumlah peserta pembinaan Struktur dan Skala Upah; Penetapan Upah Minimum Kabupaten / UMSK	420 Perusahaan; 53 Orang; 5 Buku	420 Perusahaan; 53 Orang; 5 Buku	420 Perusahaan; 53 Orang; 5 Buku	420 Perusahaan; 53 Orang; 5 Buku	100%	420 Perusahaan; 53 Orang; 5 Buku	100%	100%	
2.07.05.2.01.03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah peserta pembinaan Persyaratan Kerja; Jumlah peserta pembinaan Struktur dan Skala Upah; Penetapan Upah Minimum Kabupaten / UMSK	420 Perusahaan; 53 Orang; 5 Buku	420 Perusahaan; 53 Orang; 5 Buku	420 Perusahaan; 53 Orang; 5 Buku	420 Perusahaan; 53 Orang; 5 Buku	100%	420 Perusahaan; 53 Orang; 5 Buku	100%	100%	
2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian perselisihan hubungan industrial	99 Kasus	99 Kasus	99 Kasus	99 Kasus	100%	99 Kasus	100%	100%	
2.07.05.2.02.01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang	Jumlah peserta pembinaan	310 Orang	310 Orang	310 Orang	310 Orang	100%	310 Orang	100%	100%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun berjalan		Catatan
					Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja PD tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023 (%)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
	Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota										
2.07.05.2.02.02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian perselisihan hubungan industrial	99 kasus	99 kasus	99 kasus	99 kasus	100%	99 kasus	100%	100%	
	UPT. BALAI LATIHAN KERJA										
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian sasaran program OPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Rutin dan non kumulatif
2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	100%	2 jenis	100%	100%	Rutin dan non kumulatif
2.07.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik	9 Jenis	9 Jenis	9 Jenis	9 Jenis	100%	9 Jenis	100%	100%	Rutin dan non kumulatif
2.07.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	100%	4 Jenis	100%	100%	Rutin dan non kumulatif
2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Jumlah jenis pemeliharaan	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	100%	3 Jenis	100%	100%	Rutin dan non

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun berjalan		Catatan
					Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja PD tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023 (%)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
	Pemerintahan Daerah	peralatan dan mesin									kumulatif
2.07.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis pemeliharaan peralatan dan mesin	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	100%	3 Jenis	100%	100%	Rutin dan non kumulatif
<u>Perkiraan pencapaian Tahun Anggaran 2024</u> Sedangkan untuk tahun berjalan yakni Anggaran tahun 2024 dengan anggaran sebesar Rp. 10.878.402.395 terurai dalam 5 program dan 13 kegiatan serta 27 sub kegiatan, diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100 % atau minimal sama dengan tahun 2023, baik realisasi keuangan maupun realisasi fisik											

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN OPD

Analisis kinerja pelayanan satuan kerja perangkat daerah adalah merupakan pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan satuan kerja perangkat daerah dengan kinerja yang dibutuhkan telah sesuai dan adanya dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut serta dapat mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi di waktu yang akan datang.

Untuk menganalisis kinerja pelayanan satuan kerja perangkat daerah digunakan beberapa indikator, antara lain mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) berdasarkan peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2008 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan sasaran target sesuai dengan Rencana Strategis satuan kerja perangkat daerah dan/atau berdasarkan hasil analisis standar kebutuhan pelayanan.

Analisis pencapaian kinerja pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik dapat dilihat pada tabel 2.2 sebagai berikut:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik

No .	Indikator Kinerja			Target Renstra OPD						Realisasi Capaian					Proyeksi Tahun 2026	Catatan Analisis
		Satuan	IKK*	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan penempatan kerja dan perluasan kesempatan kerja didukung memperkuat kerjasama multipihak															
	3.1 Tingkat Kesempatan Kerja	%	91,79	92,10	92,80	93,20	93,60	94,00	94,46	92,00	92,16	93,18				Realisasi capaian mencapai 100.04% target Renstra
2.	Meningkatnya hubungan industrial yang kondusif dan peningkatan kesejahteraan Pekerja															
	2.1 Persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan	%	92,86	93,39	93,92	94,46	94,99	95,54	96,09	78,79	69,70	97,33				Realisasi capaian mencapai 74.21 % target Renstra

IKK* = Indeks
Kinerja Kunci Tahun 2020

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Penentuan isu-isu Strategis merupakan rumusan penentu keberhasilan yang berfungsi untuk lebih memfokuskan strategi lembaga/organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan misi lembaga secara efektif dan efisien. Rumusan tersebut dapat berperan dalam pencapaian tujuan tergantung kepada kinerja aparat dalam organisasi / lembaga tersebut.

Rumusan penentu keberhasilan dapat dilihat setelah kita menganalisa lingkungan internal maupun eksternal. Mengingat pentingnya faktor-faktor tersebut, maka Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik menentukan rumusan sebagai berikut :

1. Pelayanan bidang ketenagakerjaan harus didukung dengan adanya aparatur/sumber daya manusia yang memiliki skill dan kompetensi yang sesuai sebagai modal untuk mewujudkan perubahan internal.
2. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, baik sarana teknologi informasi yang beragam dan terkini maupun prasarana lain yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja.
3. Adanya dukungan penuh dari Pemerintah Kabupaten Gresik terutama dalam hal anggaran untuk memberikan pelayanan ketenagakerjaan kepada masyarakat secara optimal.

Adapun berkenaan dengan masih tingginya angka pengangguran di Kabupaten Gresik maka Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik melakukan berbagai upaya untuk mendorong penyerapan tenaga kerja di pasar kerja dengan melaksanakan program perluasan kesempatan kerja dan penempatan tenaga kerja dalam dan luar negeri serta pelatihan vokasi tenaga kerja berbasis kompetensi.

Dalam rangka optimalisasi pelayanan pelatihan kerja sesuai dengan Program Prioritas Nawakarsa dengan *output* kunci Program Fasilitas Serta Pembekalan Lulusan Baru, maka Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik melaksanakan beberapa kebijakan sebagai berikut:

- a. Revitalisasi UPT Balai Latihan Kerja dengan mengembangkan gedung pusat pelatihan yang representatif dan dikelola secara profesional untuk mendukung era revolusi industri 4.0 guna menciptakan tenaga kerja yang terampil dan terlatih serta bersertifikasi agar mampu berkompetisi dalam bursa tenaga kerja, baik di wilayah Kabupaten Gresik, di dalam negeri maupun luar Negeri serta dapat mengembangkan *entrepreneurship* dan menciptakan lapangan kerja sendiri yang bidang pelatihannya disesuaikan dengan kebutuhan pasar.
- b. Memberi kesempatan pelatihan secara gratis kepada masyarakat dalam usia produktif dan putus sekolah karena tidak mampu melanjutkan jenjang sekolah yang lebih tinggi untuk memperoleh keterampilan pada bidang-bidang kerja khusus hingga memperoleh sertifikasi di bidang tertentu dan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.
- c. Melakukan kerjasama dengan swasta/perusahaan melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR) untuk memberikan pelatihan vokasi kepada masyarakat sekitar dalam mendukung peningkatan daya saing SDM dan peningkatan perluasan kesempatan kerja.

Berkenaan dengan optimalisasi pelayanan perlindungan dan pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan program prioritas Nawakarsa dengan *output* kunci Bumi Gresik, maka Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik melakukan berbagai upaya sebagai berikut:

- a. Melaksanakan sosialisasi dan diseminasi informasi bagi calon PMI untuk peningkatan pemahaman cara bekerja di luar negeri;
- b. Membuat basis data PMI;
- c. Memberikan perlindungan PMI sebelum dan setelah bekerja;
- d. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kerja kepada CPMI;
- e. Melakukan pemberdayaan bagi PMI Purna dan keluarganya;

2.4 REVIU TERHADAP RANCANGAN AKHIR RKPD

Program dan kegiatan pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik mengacu pada rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 sebagaimana tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3
Reviu terhadap Rancangan Akhir RKPD tahun 2025
Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik

No.	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase ketercapaian sasaran program OPD	100%	8.162.020.922	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase ketercapaian sasaran program OPD	100%	8.162.020.922	
	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	Disnaker Gresik	<i>Jumlah jenis Dokumen Perencanaan dan Pelaporan</i>	<i>3 jenis</i>	<i>30.000.000</i>	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	Disnaker Gresik	<i>Jumlah jenis Dokumen Perencanaan dan Pelaporan</i>	<i>3 jenis</i>	<i>30.000.000</i>	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Disnaker Gresik	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	3 dokumen	21.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Disnaker Gresik	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	3 dokumen	21.000.000	
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Disnaker Gresik	Jumlah laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 laporan	9.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Disnaker Gresik	Jumlah laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 laporan	9.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Disnaker Gresik	Pembayaran Gaji, TTP dan Laporan Keuangan	1 Tahun	5.519.344.100	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Disnaker Gresik	Pembayaran Gaji, TTP dan Laporan Keuangan	1 Tahun	5.519.344.100	
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Disnaker Gresik	Jumlah Pegawai ASN yang mendapat gaji dan tunjangan	32 Orang	5.511.344.100	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Disnaker Gresik	Jumlah Pegawai ASN yang mendapat gaji dan tunjangan	32 Orang	5.511.344.100	
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Disnaker Gresik	Jumlah laporan keuangan akhir	1 laporan	8.000.000	Koordinasi dan Penyusunan	Disnaker Gresik	Jumlah laporan keuangan akhir	1 laporan	8.000.000	

No.	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Keuangan Akhir Tahun SKPD		tahun			Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		tahun			
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Disnaker Gresik	Jumlah jenis penyediaan administrasi umum perangkat daerah	6 jenis sub kegiatan	1.136.946.822	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Disnaker Gresik	Jumlah jenis penyediaan administrasi umum perangkat daerah	6 jenis sub kegiatan	1.136.946.822	
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Disnaker Gresik	Jumlah Komponen Instalasi Listrik yang disediakan	9 Jenis	16.051.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Disnaker Gresik	Jumlah Komponen Instalasi Listrik yang disediakan	9 Jenis	16.051.000	
6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Disnaker Gresik	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4 Paket	880.611.280	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Disnaker Gresik	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4 Paket	880.611.280	
7	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Disnaker Gresik	Jumlah penyediaan makan dan minum	3 Paket	84.935.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Disnaker Gresik	Jumlah penyediaan makan dan minum	3 Paket	84.935.000	
8	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Disnaker Gresik	Jumlah bahan cetak; Jumlah penggandaan	3 Paket	38.508.542	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Disnaker Gresik	Jumlah bahan cetak; Jumlah penggandaan	3 Paket	38.508.542	
9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Disnaker Gresik	Jumlah bahan bacaan	8 Jenis	7.500.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Disnaker Gresik	Jumlah bahan bacaan	8 Jenis	7.500.000	
10	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Disnaker Gresik	Jumlah fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Bulan	89.341.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Disnaker Gresik	Jumlah fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Bulan	89.341.000	
11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Disnaker Gresik	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis	1 Dokumen	20.000.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Disnaker Gresik	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis	1 Dokumen	20.000.000	

No.	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Elektronik pada SKPD					Elektronik pada SKPD			
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Disnaker Gresik	Jumlah waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 Bulan	767.680.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Disnaker Gresik	Jumlah waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 Bulan	767.680.000	
12	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Disnaker Gresik	Jumlah waktu penyediaan jasa surat menyurat	12 Bulan	5.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Disnaker Gresik	Jumlah waktu penyediaan jasa surat menyurat	12 Bulan	5.000.000	
13	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Disnaker Gresik	Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan internet	12 Bulan	170.280.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Disnaker Gresik	Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan internet	12 Bulan	170.280.000	
14	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Disnaker Gresik	Jumlah Tenaga Administrasi Kantor Non ASN	22 Orang	592.400.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Disnaker Gresik	Jumlah Tenaga Administrasi Kantor Non ASN	22 Orang	592.400.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Disnaker Gresik	Pemeliharaan Gedung, Peralatan kantor dan Kendaraan Dinas	12 bulan	708.050.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Disnaker Gresik	Pemeliharaan Gedung, Peralatan kantor dan Kendaraan Dinas	12 bulan	708.050.000	
15	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Disnaker Gresik	Jumlah Kendaraan Mobil; Jumlah Kendaraan Sepeda Motor	7 Unit; 10 Unit	140.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Disnaker Gresik	Jumlah Kendaraan Mobil; Jumlah Kendaraan Sepeda Motor	7 Unit; 10 Unit	140.000.000	
16	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Disnaker Gresik	Jumlah pemeliharaan peralatan kantor	6 Jenis	40.050.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Disnaker Gresik	Jumlah pemeliharaan peralatan kantor	6 Jenis	40.050.000	
17	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan	Disnaker Gresik	Jumlah pemeliharaan	1 paket; 1 paket	525.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung	Disnaker Gresik	Jumlah pemeliharaan	1 paket; 1 paket	525.000.000	

No.	Rancangan Akhir RKPД					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Bangunan Lainnya		gedung kantor; Jumlah pemeliharaan taman			Kantor dan Bangunan Lainnya		gedung kantor; Jumlah pemeliharaan taman			
	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Disnaker Gresik	Persentase Data Sektoral Dinas Tenaga Kerja yang diakses secara elektronik; Tingkat Kematangan Layanan Ketenagakerjaan	70%;3	110.926.000	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Disnaker Gresik	Persentase Data Sektoral Dinas Tenaga Kerja yang diakses secara elektronik; Tingkat Kematangan Layanan Ketenagakerjaan	70%;3	110.926.000	
	<i>Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)</i>	Disnaker Gresik	<i>Jumlah data dan informasi profil ketenagakerjaan</i>	<i>15 Buku</i>	<i>110.926.000</i>	<i>Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)</i>	Disnaker Gresik	<i>Jumlah data dan informasi profil ketenagakerjaan</i>	<i>15 Buku</i>	<i>110.926.000</i>	
18	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Disnaker Gresik	Aplikasi (SIM); pemeliharaan website; Profil Ketenagakerjaan	1 Aplikasi; 15 Buku	110.926.000	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Disnaker Gresik	Aplikasi (SIM); pemeliharaan website; Profil Ketenagakerjaan	1 Aplikasi; 15 Buku	110.926.000	
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Disnaker Gresik	Persentase Pencari Kerja yang diberi pelatihan	38,03%	1.070.000.100	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Disnaker Gresik	Persentase Pencari Kerja yang diberi pelatihan	38,03%	1.070.000.100	
	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Disnaker Gresik	Terlaksananya pembinaan LPKS dan pelatihan bagi masyarakat pencari kerja	108 orang	1.000.000.000	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Disnaker Gresik	Terlaksananya pembinaan LPKS dan pelatihan bagi masyarakat pencari kerja	108 orang	1.000.000.000	

No.	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
19	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Disnaker Gresik	Lembaga Pelatihan Kerja Swasta, Masyarakat pencari kerja	108 orang	1.000.000.000	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Disnaker Gresik	Lembaga Pelatihan Kerja Swasta, Masyarakat pencari kerja	108 orang	1.000.000.000	
	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Disnaker Gresik	Terlaksananya konsultasi produktivitas pada perusahaan kecil	100 Perusahaan	70.000.100	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Disnaker Gresik	Terlaksananya konsultasi produktivitas pada perusahaan kecil	100 Perusahaan	70.000.100	
20	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Disnaker Gresik	Produktivitas tenaga kerja pada perusahaan kecil	100 Perusahaan	70.000.100	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Disnaker Gresik	Produktivitas tenaga kerja pada perusahaan kecil	100 Perusahaan	70.000.100	
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Disnaker Gresik	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan	53,96%	898.000.000	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Disnaker Gresik	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan	53,96%	898.000.000	
	<i>Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/ Kota</i>	Disnaker Gresik	<i>Fasilitasi pelayanan antarkerja bagi masyarakat pencari kerja</i>	<i>320 Orang</i>	<i>500.000.000</i>	<i>Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/ Kota</i>	Disnaker Gresik	<i>Fasilitasi pelayanan antarkerja bagi masyarakat pencari kerja</i>	<i>320 Orang</i>	<i>500.000.000</i>	
21	Pelayanan antar Kerja	Disnaker Gresik	Penempatan pencari kerja di perusahaan wilayah Kabupaten Gresik, Penempatan pencari kerja penyandang disabilitas	275 Orang, 10 Orang	300.000.000	Pelayanan antar Kerja	Disnaker Gresik	Penempatan pencari kerja di perusahaan wilayah Kabupaten Gresik, Penempatan pencari kerja penyandang disabilitas	275 Orang, 10 Orang	300.000.000	
22	Perluasan Kesempatan Kerja	Disnaker Gresik	Pembinaan tenaga kerja mandiri	35 Orang	200.000.000	Perluasan Kesempatan Kerja	Disnaker Gresik	Pembinaan tenaga kerja mandiri	35 Orang	200.000.000	

No.	Rancangan Akhir RKPd					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	<i>Pengelolaan Informasi Pasar Kerja</i>	Disnaker Gresik	<i>Tersedianya Informasi Pasar Kerja bulanan dan tahunan</i>	65 Buku	98.000.000	<i>Pengelolaan Informasi Pasar Kerja</i>	Disnaker Gresik	<i>Tersedianya Informasi Pasar Kerja bulanan dan tahunan</i>	65 Buku	98.000.000	
23	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Disnaker Gresik	Buku laporan IPK bulanan dan tahunan, Job Interview	1500 orang	98.000.000	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Disnaker Gresik	Buku laporan IPK bulanan dan tahunan, Job Interview	1500 orang	98.000.000	
	<i>Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/ Kota</i>	Disnaker Gresik	<i>Pembinaan dan perlindungan bagi PMI (Pra dan Purna Penempatan)</i>	110 Orang	300.000.000	<i>Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/ Kota</i>	Disnaker Gresik	<i>Pembinaan dan perlindungan bagi PMI (Pra dan Purna Penempatan)</i>	110 Orang	300.000.000	
24	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Disnaker Gresik	Pembinaan Penempatan dan perlindungan PMI	20 Orang, 90 Orang	300.000.000	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Disnaker Gresik	Pembinaan Penempatan dan perlindungan PMI	20 Orang, 90 Orang	300.000.000	
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Disnaker Gresik	Persentase Perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama	23,83%	654.605.000	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Disnaker Gresik	Persentase Perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama	23,83%	654.605.000	
	<i>Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota</i>	Disnaker Gresik	Jumlah peserta pembinaan Persyaratan Kerja; Jumlah peserta pembinaan Struktur dan Skala Upah; Penetapan Upah Minimum Kabupaten / UMSK	1 laporan	285.180.000	<i>Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota</i>	Disnaker Gresik	Jumlah peserta pembinaan Persyaratan Kerja; Jumlah peserta pembinaan Struktur dan Skala Upah; Penetapan Upah Minimum Kabupaten / UMSK	1 laporan	285.180.000	

No.	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
25	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Disnaker Gresik	Jumlah peserta pembinaan Persyaratan Kerja; Jumlah peserta pembinaan Struktur dan Skala Upah; Penetapan Upah Minimum Kabupaten / UMSK	1 laporan	285.180.000	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Disnaker Gresik	Jumlah peserta pembinaan Persyaratan Kerja; Jumlah peserta pembinaan Struktur dan Skala Upah; Penetapan Upah Minimum Kabupaten / UMSK	1 laporan	285.180.000	
	<i>Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/ Kota</i>	Disnaker Gresik	<i>Jumlah penyelesaian perselisihan hubungan industrial</i>	<i>12 laporan</i>	<i>369.425.000</i>	<i>Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/ Kota</i>	Disnaker Gresik	<i>Jumlah penyelesaian perselisihan hubungan industrial</i>	<i>12 laporan</i>	<i>369.425.000</i>	
26	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Disnaker Gresik	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	66 perkara	310.000.000	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Disnaker Gresik	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	66 perkara	310.000.000	
27	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah	Disnaker Gresik	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	55 perkara	59.425.000	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdamp	Disnaker Gresik	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	55 perkara	59.425.000	

No.	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Kabupaten/Kota					ak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Program dan kegiatan yang diusulkan oleh para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat yang terkait langsung, LSM, Serikat Pekerja/Buruh, Pengusaha, Perguruan Tinggi yang diperoleh secara langsung maupun dari hasil musrenbang kecamatan diseleksi untuk disesuaikan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik.

Program dan kegiatan yang sesuai dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik akan diakomodir dalam rancangan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik Tahun 2025 untuk dimusyawarahkan dalam Forum OPD, untuk kemudian disepakati untuk dijadikan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025.

Adapun usulan-usulan program dan kegiatan yang berasal dari berbagai pemangku kepentingan (stakeholders) dapat dilihat pada tabel 2.4 sebagai berikut:

Tabel 2.4

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2025 Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik

No.	Program / Kegiatan	Lokasi			Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan Penting
		Kab.	Kec.	Desa			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja		18 kecamatan				
A	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja	Gresik			Tercapainya peningkatan kompetensi pencari kerja berbasis demen driven dan entrepreneurship	10 pelatihan untuk 600 Orang	Pelatihan dengan pola 3 in 1
1	Pelatihan Ahli K3 Umum	Gresik			Tercapainya peningkatan kompetensi pencari kerja berbasis demen driven dan entrepreneurship	60 orang	Pemagangan
2	Pelatihan Basic Scaffolding	Gresik			Tercapainya peningkatan kompetensi pencari kerja berbasis demen driven dan entrepreneurship	60 orang	Penempatan
3	Pelatihan Desain Grafis	Gresik			Tercapainya peningkatan kompetensi pencari kerja berbasis demen driven dan entrepreneurship	80 orang	
4	Pelatihan K3 First Aid	Gresik			Tercapainya peningkatan kompetensi pencari kerja berbasis demen driven dan entrepreneurship	60 orang	
5	Pelatihan Operator Alat Berat	Gresik			Tercapainya peningkatan kompetensi pencari kerja berbasis demen driven dan entrepreneurship	60 orang	
6	Pelatihan Pekerjaan Ketinggian	Gresik			Tercapainya peningkatan kompetensi pencari kerja berbasis demen driven dan entrepreneurship	60 orang	
7	Pelatihan Satpam	Gresik			Tercapainya peningkatan kompetensi pencari kerja berbasis demen driven dan entrepreneurship	60 orang	
8	Pelatihan Teknik Instalatir Listrik	Gresik			Tercapainya peningkatan kompetensi pencari kerja berbasis demen driven dan entrepreneurship	60 orang	
9	Pelatihan Teknik Mesin Pendingin	Gresik			Tercapainya peningkatan kompetensi pencari kerja	60 orang	

No.	Program / Kegiatan	Lokasi			Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan Penting
		Kab.	Kec.	Desa			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					berbasis demen driven dan entrepreneurship		
10	Pelatihan Teknik Service Handphone	Gresik			Tercapainya peningkatan kompetensi pencari kerja berbasis demen driven dan entrepreneurship	60 orang	
B	Sertifikasi Profesi	Gresik		-	Tercapainya peningkatan kompetensi pencari kerja dengan mengikuti ujian serifikasi profesi	100 orang	Kerjasama dengan LSP2 BLK Surabaya
C	Pembinaan lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Gresik		-	Tercapainya peningkatan kompetensi pengelolaan lembaga pelatihan kerja swasta	50 orang	Kerjasama dengan Disnakertrans Prov. Jatim

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 mengamanatkan bahwa pembangunan aparatur negara dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk mendukung keberhasilan pembangunan bidang lainnya. Sebagai wujud komitmen nasional untuk melakukan reformasi birokrasi, pemerintah telah menetapkan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan menjadi prioritas utama dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. Makna reformasi birokrasi adalah : Perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan Indonesia, Pertaruhan besar bagi bangsa Indonesia dalam menghadapi tantangan abad ke-21, Berkaitan dengan ribuan proses tumpang tindih antar fungsi-fungsi pemerintahan, melibatkan jutaan pegawai, dan memerlukan anggaran yang tidak sedikit; Upaya menata ulang proses birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berfikir di luar kebiasaan/rutinitas yang ada, dan dengan upaya luar biasa; Upaya merevisi dan membangun berbagai regulasi, memodernkan berbagai kebijakan dan praktek manajemen pemerintah pusat dan daerah, dan menyesuaikan tugas fungsi instansi pemerintah dengan paradigma dan peran baru.

Atas dasar makna tersebut, pelaksanaan reformasi birokrasi diharapkan dapat : mengurangi dan akhirnya menghilangkan setiap penyalahgunaan kewenangan publik oleh pejabat di instansi yang bersangkutan; menjadikan negara yang memiliki birokrasi yang bersih, mampu dan melayani; Meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat, Meningkatkan mutu perumusan dan pelaksanaan kebijakan/program instansi; Meningkatkan efisiensi

(biaya dan waktu) dalam pelaksanaan semua segi tugas organisasi; menjadikan birokrasi Indonesia antisipasif, proaktif, dan efektif dalam menghadapi globalisasi dan dinamika perubahan lingkungan strategis.

Sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional hubungan Renja Disnaker Kabupaten Gresik dengan Dokumen Perencanaan lainnya adalah antara lain dengan :

1. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 tahun.
2. Rencana Pembangunan Tahunan Kementerian/Lembaga yang disebut Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja KL) adalah Dokumen Perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 1 (satu) tahun.
3. Rencana Pembangunan Tahunan Nasional yang disebut Rencana Kerja Pemerintah (RKP) adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Perangkat Daerah yang disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang disebut RPJM adalah Renstrada dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/Lembaga yang disebut Renstra Kementerian/Lembaga (Renstra KL) adalah dokumen perencanaan kementerian/Lembaga untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang yang disebut RPJP adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 tahun.

Semua perencanaan tersebut di atas saling mengait karena semua itu merupakan satu kesatuan dari pada perencanaan pembangunan nasional.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Untuk merealisasikan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik perlu ditetapkan tujuan-tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Tujuan ini ditetapkan untuk memberikan arah terhadap program pemberdayaan masyarakat secara umum serta dalam rangka memberikan kepastian operasionalisasi dan keterkaitan antara misi dengan program yang telah ditetapkan.

3.2.1. Tujuan Dinas Tenaga Kerja

Tujuan organisasi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi organisasi yang mengandung makna :

- a. Merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu sampai tahun terakhir RENJA.
- b. Menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi.
- c. Meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah sasaran dan strategi organisasi berupa kebijakan, program operasional dan kegiatan pokok organisasi selama kurun waktu RENJA.

Berdasarkan tujuan organisasi tersebut maka dalam kedudukannya sebagai Organisasi Perangkat Daerah, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik menetapkan tujuan sebagai berikut :

” Terserapnya tenaga kerja warga Gresik yang berdampak pada penanggulangan kemiskinan ”

3.2.2. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan secara profesional. Sasaran organisasi yang ditetapkan pada dasarnya merupakan bagian dari proses perencanaan strategis dengan fokus utama berupa tindakan pengalokasian sumber daya organisasi ke dalam strategi organisasi.

Sasaran organisasi yang ditetapkan pada dasarnya merupakan bagian dari proses perencanaan strategis dengan fokus utama berupa tindakan pengalokasian sumber daya organisasi ke dalam strategi organisasi. Oleh karenanya penetapan sasaran harus memenuhi kriteria *specific, measurable, aggressive but attainable, result oriented and time bond*.

Berdasarkan makna penetapan sasaran tersebut maka sampai dengan akhir tahun 2026, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik menetapkan sasaran dengan rincian sebagai berikut:

- 1. Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan penempatan kerja dan perluasan kesempatan kerja didukung memperkuat kerjasama multipihak**
- 2. Meningkatnya hubungan industrial yang kondusif, harmonis dan dinamis**

Matriks Tujuan dan Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2025

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terserapnya tenaga kerja warga Gresik yang berdampak pada penanggulangan kemiskinan	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan penempatan kerja dan perluasan kesempatan kerja didukung memperkuat kerjasama multipihak	1. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	6,00
			2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	75,00
			3. Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)	93,77
		Meningkatnya hubungan industrial yang kondusif, harmonis dan dinamis	Persentase Penyelesaian Kasus Perselisihan Hubungan Industrial	97,99

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2025

Program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik Tahun 2025 yang tertuang dalam Dokumen Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik Tahun 2025, adalah merupakan rangkaian program dan kegiatan yang berkesinambungan yang telah dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024.

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan program dan kegiatan pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik Tahun 2025 adalah untuk mencapai visi Pemerintah Kabupaten Gresik yaitu: ***“Mewujudkan Gresik Baru Yang Lebih Mandiri, Sejahtera, Berdaya Saing dan Berkemajuan Berlandaskan Akhlakul Karimah”*** serta mencapai misi ke 5 (lima) yaitu ***“Meningkatkan kesejahteraan sosial dengan menciptakan lapangan kerja dan menjamin pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat Gresik”***

Oleh karena itu, untuk menjamin kesinambungan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik pada tahun-tahun mendatang sekaligus sebagai upaya pencapaian tujuan, sasaran dan mengusulkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gresik, sejumlah **sejumlah 5 (lima) program dan 13 kegiatan serta 27 sub kegiatan**, dengan total kebutuhan dana atau pagu indikatif yang direncanakan sebesar **Rp16.494.054.726 (enam belas miliar empat ratus sembilan puluh empat juta lima puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah)** sebagaimana tertuang dalam tabel Matrik Program dan Kegiatan Tahun 2025 yang terbagi atas Program dan Kegiatan Super Prioritas serta Program dan Kegiatan Prioritas. Secara umum rincian program, kegiatan dan pagu indikatif dapat disampaikan sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA.

a. Latar Belakang

Yang menjadi latar belakang daripada program tersebut diatas adalah masih rendahnya tingkat pelayanan yang disebabkan kurangnya sarana / prasarana dan kualitas Sumber Daya Manusia.

b. Tujuan Program

Yang menjadi tujuan program tersebut diatas adalah untuk memenuhi pelayanan administrasi perkantoran.

c. Sasaran Program

Yang menjadi sasaran daripada program tersebut diatas adalah terwujudnya pelayanan administrasi bidang ketenagakerjaan

d. Kegiatan Indikatif

Kegiatan indikatif dari program tersebut diatas adalah terdiri dari 6 kegiatan yaitu :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

e. Sub Kegiatan

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
4. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
9. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
10. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
11. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
12. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
13. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
14. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
15. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
16. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
17. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
18. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
19. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
20. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

f. Indikator Keberhasilan

Indikator keberhasilan dari sub kegiatan tersebut diatas adalah :

1. tercukupinya pemenuhan kebutuhan barang cetakan.
2. tercukupinya prosentase kebutuhan bahan bacaan
3. tercukupinya pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman

4. tercukupinya biaya perjalanan dinas dalam dan keluar daerah.
5. tercapainya pelaksanaan bagi administrasi perkantoran.
6. meningkatnya kebugaran pegawai Disnaker Gresik dan tercapainya keamanan kantor
7. Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang di beli
8. terpeliharanya 3 gedung Disnaker, gedung BLK dan 2 gedung Workshop BLK
9. terwujudnya pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional.
10. jumlah perlatalan dan perlengkapan kantor yang bisa diperbaiki dalam setahun
11. terwujudnya laporan capaian kinerja dan ikstisar realisasi kinerja Disnaker dalam 1 tahun.
12. Terwujudnya Renja Dinas Tenaga Kerja Tahun 2024.
13. Terwujudnya hasil Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Kegiatan Dinas Tenaga Kerja
14. Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

2. PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA

a. Latar Belakang

Yang melatar belakang dari program tersebut diatas adalah masih rendahnya kualitas data ketenagakerjaan.

b. Tujuan Program

Tujuan dari program tersebut diatas adalah mencetak Profil Ketenagakerjaan.

c. Sasaran Program

Yang menjadi sasaran program tersebut diatas adalah Terwujudnya data ketenagakerjaan yang valid.

d. Kegiatan Indikatif

Kegiatan indikatif dari program tersebut diatas adalah Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)

e. Sub Kegiatan

Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro

f. Indikator Keberhasilan

Indikator keberhasilan sub kegiatan tersebut diatas adalah :

- 1) Tersusunnya aplikasi Gresikkerja.
- 2) Tersusunnya Profil Ketenagakerjaan

3. PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA

a. Latar Belakang

Yang melatar belakangi dari program tersebut diatas adalah masih rendahnya kualitas angkatan kerja sehingga untuk memasuki dunia kerja masih belum siap.

b. Tujuan Program

Tujuan dari program tersebut diatas adalah mencetak tenaga kerja terampil, berkualitas dan produktif.

c. Sasaran Program

Yang menjadi sasaran program tersebut diatas adalah Terwujudnya tenaga kerja yang siap pakai di dunia kerja.

d. Kegiatan Indikatif

Kegiatan indikatif dari program tersebut diatas adalah

- 1) Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
- 2) Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil

e. Sub Kegiatan

- 1) Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerjaberdasarkan Klaster Kompetensi
- 2) Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil

f. Indikator Keberhasilan

Indikator keberhasilan dari sub kegiatan tersebut diatas adalah :

- 1) tersedianya tenaga kerja terampil, berkualitas dan produktif yang siap memasuki dunia kerja.
- 2) Tersosialisasinya lembaga pelatihan swasta di Kabupaten Gresik.
- 3) Meningkatnya Jumlah peserta sosialisasi Pengukuran dan Analisa Produktifitas

4. PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA

a. Latar Belakang

Yang menjadi latar belakang dari program tersebut diatas adalah meningkatnya jumlah angka pengangguran setiap tahun

b. Tujuan Program

Tujuan program tersebut diatas adalah untuk memberi kesempatan terbukanya lapangan kerja bagi masyarakat dan pengembangan usaha yang layak guna mengurangi angka pengangguran.

c. Sasaran Program

Sasaran program tersebut diatas adalah peningkatan kualitas pelayanan tenaga kerja dan pengembangan lapangan kerja.

d. Kegiatan Indikatif

Kegiatan indikatif dari program tersebut diatas adalah

- 1) Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota
- 2) Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
- 3) Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota

e. Sub Kegiatan

- 1) Pelayanan antar Kerja
- 2) Perluasan Kesempatan Kerja
- 3) Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online
- 4) Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) /Pekerja Migran Indonesia (PMI)

f. Indikator Keberhasilan

Indikator keberhasilan dari sub kegiatan tersebut diatas adalah

- 1) Meningkatnya ketrampilan pencari kerja lulusan SLTA dan SMK
- 2) terwujudnya penyuluhan prosedur penempatan calon tenaga kerja Indonesia ke luar negeri sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku
- 3) Meningkatnya jumlah penempatan penyandang cacat / disabilitas
- 4) Meningkatnya jumlah penempatan tenaga kerja di perusahaan
- 5) tercapainya informasi bursa kerja sehingga dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan
- 6) terlaksananya kegiatan JOB FAIR

5. PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL

a. Latar Belakang

Latar belakang dari program tersebut diatas adalah masih adanya beberapa perusahaan yang masih belum memahami peraturan perundang–undangan ketenagakerjaan sehingga masih ada pelanggaran dalam pelaksanaan dan masih belum optimalnya peran serta fungsi lembaga ketenagakerjaan.

b. Tujuan Program

Tujuan program tersebut diatas adalah mengurangi adanya pelanggaran ketenagakerjaan dan optimalnya fungsi dan peran lembaga ketenagakerjaan

c. Sasaran Program

Sasaran program tersebut diatas adalah tercapainya ketenangan bekerja di perusahaan dan terwujudnya fungsi dan peran lembaga ketenagakerjaan secara optimal.

d. Kegiatan Indikatif

Kegiatan indikatif dari program tersebut diatas adalah

- 1) Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
- 2) Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota.

e. Sub Kegiatan

- 1) Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan
- 2) Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat / Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- 3) Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat / Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

f. Indikator Keberhasilan

Indikator keberhasilan dari sub kegiatan tersebut adalah

- 1) terwujudnya hubungan industrial yang kondusif
- 2) terwujudnya pengupahan yang sesuai dengan kebutuhan hidup layak
- 3) Pemahaman & pelaksanaan akan pentingnya pemenuhan hak-hak dan perlindungan yang mendasar bagi pekerja dan pengusaha
- 4) Jumlah Asosiasi Pengusaha, Serikat Pekerja / Serikat Buruh yang diverifikasi
- 5) Jumlah LKS Tripartit yang dibina

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Tabel rencana kerja berdasarkan hasil pengerjaan Tabel 2.8, yaitu sebagai berikut

Table 2.8
Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2025
Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik

BAB V

PENUTUP

Sebagai uraian akhir pada bab penutup Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik tahun 2025 ini, disampaikan kaidah pelaksanaan Rencana Kerja dengan rincian penjelasan sebagai berikut :

1. Sesuai ketentuan UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka dengan ditetapkannya Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja ini selanjutnya akan dijadikan dokumen perencanaan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Dengan ditetapkannya Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik tahun 2025 ini, maka semua pihak pemangku kepentingan (stakeholders) yang berkaitan dengan pembangunan bidang ketenagakerjaan tersebut untuk menjadikannya sebagai acuan dan arahan operasionalitas peran masing – masing dalam melaksanakan program dan kegiatan tahunan.
3. Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik tahun 2025 ini akan dijadikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja tahunan dan sekaligus sebagai dasar laporan pelaksanaan tugas pokok dari fungsi organisasi selama 1 (satu) tahun.
4. Diharapkannya dengan tersusunnya Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik tahun 2025 ini dapat dibangun komitmen bersama dari seluruh jajaran organisasi untuk taat asas dalam perencanaan kinerja tahunan dan dapat dihindari adanya Rencana Kegiatan atau Rencana Kinerja tahunan yang keluar dari kesepakatan dan Rencana Kerja.

Tabel 2.8
RENCANA KERJA (RENJA) DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN GRESIK
TAHUN 2025

NO.	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
											NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		DINAS TENAGA KERJA						16,494,054,726							9,802,000,000
	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA						16,494,054,726							9,802,000,000
1	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian sasaran program OPD	100%	100%	100%	100%	6,178,804,241							6,727,000,000
	2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah jenis Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	18 jenis	2 jenis	3 jenis	3 jenis	14,857,851				P2 - Perluasan lapangan pekerjaan dan memba			20,000,000
	2.07.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	19 jenis	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	11,977,151	Kab. Gresik, Kebomas, Dahanrej	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		P2 - Perluasan lapangan pekerjaan dan memba			15,000,000
	2.07.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	60 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	2,880,700	Kab. Gresik, Kebomas, Dahanrej	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatkan	P2 - Perluasan lapangan pekerjaan dan memba			5,000,000
	2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pembayaran Gaji, TTP dan Laporan Keuangan	6 tahun	1 tahun	1 tahun	12 tahun	5,115,109,780							5,505,000,000
	2.07.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	192 orang/72 bulan	32 Orang / 12 bulan	32 Orang / 12 bulan	30 Orang / 12 bulan	5,111,443,000	Kab. Gresik, Kebomas, Dahanrej	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatkan	P2 - Perluasan lapangan pekerjaan dan memba			5,500,000,000
	2.07.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD													
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	360 laporan	10 laporan	1 laporan	1 laporan	3,666,780	Kab. Gresik, Kebomas, Dahanrej	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatkan	P2 - Perluasan lapangan pekerjaan dan memba			5,000,000

NO.	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
											NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis penyediaan administrasi umum perangkat daerah	36 jenis sub kegiatan	6 jenis sub kegiatan	6 jenis sub kegiatan	6 jenis sub kegiatan	161,156,437							241,000,000
	2.07.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	27 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	7,150,976	Kab. Gresik, Kebomas, Dahanrej	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatkan	P2 - Perluasan lapangan pekerjaan dan memba			10,000,000
	2.07.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	24 paket	11 Paket	4 Paket	4 Paket	30,123,305	Kab. Gresik, Kebomas, Dahanrej	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatkan	P2 - Perluasan lapangan pekerjaan dan memba			50,000,000
	2.07.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	36 paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	48,361,000	Kab. Gresik, Kebomas, Dahanrej	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatkan	P2 - Perluasan lapangan pekerjaan dan memba			60,000,000
	2.07.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	24 paket	2 paket	3 Paket	3 Paket	20,805,978	Kab. Gresik, Kebomas, Dahanrej	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatkan	P2 - Perluasan lapangan pekerjaan dan memba			35,000,000
	2.07.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 paket	7 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	2,754,000	Kab. Gresik, Kebomas, Dahanrej	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatkan	P2 - Perluasan lapangan pekerjaan dan memba			4,000,000
	2.07.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 laporan	66 laporan	12 laporan	12 laporan	44,735,000	Kab. Gresik, Kebomas, Dahanrej	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatkan	P2 - Perluasan lapangan pekerjaan dan memba			70,000,000
	2.07.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD													
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3 Dokumen	0 dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	7,226,178	Kab. Gresik, Kebomas, Dahanrej	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatkan	P2 - Perluasan lapangan pekerjaan dan memba			12,000,000

NO.	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
											NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	72 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	811,008,173	Kab. Gresik, Kebomas, Dahanrej	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		P2 - Perluasan lapangan pekerjaan dan memba			836,000,000
	2.07.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	72 laporan	240 laporan	12 laporan	12 laporan	3,780,000	Kab. Gresik, Kebomas, Dahanrej	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		P2 - Perluasan lapangan pekerjaan dan memba			6,000,000
	2.07.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	72 laporan	12 Laporan	3 laporan	3 laporan	172,314,173	Kab. Gresik, Kebomas, Dahanrej	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		P2 - Perluasan lapangan pekerjaan dan memba			180,000,000

NO.	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
											NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.07.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	132 laporan	22 Laporan	22 Laporan	22 Laporan	634,914,000	Kab. Gresik, Kebomas, Dahanrej	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		P2 - Perluasan lapangan pekerjaan dan memba			650,000,000
	2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Gedung, Peralatan kantor dan Kendaraan Dinas	72 bulan	3 jenis	12 bulan	12 bulan	76,672,000				P2 - Perluasan lapangan pekerjaan dan memba			125,000,000
	2.07.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	82 unit	17 Unit	17 Unit	17 Unit	38,610,000	Kab. Gresik, Kebomas, Dahanrej	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		P2 - Perluasan lapangan pekerjaan dan memba			50,000,000
	2.07.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	36 unit		47 unit	47 unit	17,260,000	Kab. Gresik, Kebomas, Dahanrej	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		P2 - Perluasan lapangan pekerjaan dan memba			25,000,000
	2.07.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	72 unit	49 unit	2 unit	2 unit	20,802,000	Kab. Gresik, Kebomas, Dahanrej	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		P2 - Perluasan lapangan pekerjaan dan memba			50,000,000
	2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Data Sektoral Dinas Tenaga Kerja yang diakses secara elektronik; Tingkat Kematangan Layanan Ketenagakerjaan	100%;4	55.00%	75%	85%;3	77,426,250							80,000,000
	2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah data dan informasi profil ketenagakerjaan	78 buku	15 Buku	15 Buku	15 Buku	77,426,250				P2 - Perluasan lapangan pekerjaan dan memba			80,000,000
	2.07.02.2.01.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro													
			Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	6 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	77,426,250	Kab. Gresik, Kebomas, Dahanrej	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		P2 - Perluasan lapangan pekerjaan dan memba			80,000,000

NO.	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
											NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja yang diberi pelatihan	38.79%	43.03%	48.03%	38.03%	9,421,740,095							1,860,000,000
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Terlaksananya pembinaan LPKS dan pelatihan bagi masyarakat pencari kerja	657 orang	297 orang	208 orang	208 orang	9,363,840,095				P2 - Perluasan lapangan pekerjaan dan memba			-
	2.07.03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi													
			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	477 orang	252 Orang	108 orang	108 orang	9,363,840,095	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU		P2 - Perluasan lapangan pekerjaan dan memba			1,800,000,000
	2.07.03.2.04	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Terlaksananya konsultasi produktivitas pada perusahaan kecil	315 Perusahaan	45 perusahaan	100 Perusahaan	100 Perusahaan	57,900,000							60,000,000
	2.07.03.2.04.01	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil													
			Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	315 Perusahaan	45 perusahaan	100 Perusahaan	100 Perusahaan	57,900,000	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)\		P2 - Perluasan lapangan pekerjaan dan memba			60,000,000
	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan	59.49%	39.04%	53.96%	53.96%	327,940,665							510,000,000
	2.07.04.2.01	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi pelayanan antarkerja bagi masyarakat pencari kerja	1.970 Orang	1994 orang	320 Orang	320 Orang	152,939,365			Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatkan	P2 - Perluasan lapangan pekerjaan dan memba			290,000,000
	2.07.04.2.01.02	Pelayanan antar Kerja													
			Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	1.710 Orang	1832 Orang	285 Orang	285 Orang	111,575,165	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)\	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatkan	P2 - Perluasan lapangan pekerjaan dan memba			200,000,000
	2.07.04.2.01.05	Perluasan Kesempatan Kerja													
			Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	215 orang	35 Orang	35 Orang	35 Orang	41,364,200	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)\	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatkan	P2 - Perluasan lapangan pekerjaan dan memba			90,000,000

NO.	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
											NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Tersedianya Informasi Pasar Kerja bulanan dan tahunan	1.825 buku	65 buku	65 Buku	65 Buku	41,248,485							50,000,000
	2.07.04.2.03.02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online													
			Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	400 orang	3904 Orang	1500 orang	1500 orang	41,248,485	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)\	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatkan	P2 - Perluasan lapangan pekerjaan dan memba			50,000,000

NO.	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
											NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan pelindungan bagi PMI (Pra dan Purna Penempatan)	675 orang	127 orang	110 Orang	110 Orang	133,752,815							170,000,000
	2.07.04.2.04.01	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)													
			Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	675 orang	127 orang	110 Orang	110 Orang	133,752,815	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)\	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatkan	P2 - Perluasan lapangan pekerjaan dan memba			170,000,000
	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama	24.30%	94.56%	23.83%	23.83%	488,143,475							625,000,000
	2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar	58 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	198,252,655				P2 - Perluasan lapangan pekerjaan dan memba			250,000,000
	2.07.05.2.01.03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan													
			Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek	58 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	198,252,655	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)\	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatkan	P2 - Perluasan lapangan pekerjaan dan memba			250,000,000
	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial	105 laporan	75 kasus	12 laporan	12 laporan	289,890,820			Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatkan	P2 - Perluasan lapangan pekerjaan dan memba			375,000,000
	2.07.05.2.02.01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Perselisihan yang Dicegah	605 perkara	75 perkara	66 perkara	66 perkara	231,549,820	Kab. Gresik, Semua Kecamatan,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)\	Melanjutka n Pengemb angan Infra	P2 - Perluasan lapangan			325,000,000
	2.07.05.2.02.02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	646 perkara	73 perkara	55 perkara	55 perkara	58,341,000	Kab. Gresik, Semua Kecamatan,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)\	Melanjutka n Pengemb angan Infra	P2 - Perluasan lapangan			50,000,000
	JUMLAH							16,494,054,726							9,802,000,000